DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Abdul Qadir Djailani. 2009. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Universitas Michigan: Media Da'wah.

Haryono, Dhanikaswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Huda, K. Khoirul. 2018. *Tiga Dalil Bolehnya Manusia Membuat Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ilmar, Aminuddin. 2006. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Manan, Abdul. 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Manan, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Panjaitan, Hulma. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: INDHILL CO

Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Achmad, Dirga dan Ali Imran Nasution. 2022. Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Maju*. 2(1): 22-35

Adrianty, Santhy Ainun, dkk. 2019. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS. *Perspektif Hukum*. 19(2): 250-262

Amir, Syarah Syam, dkk. 2022. Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. 17(1): 8-24

Arrum, Desi Ariangning. 2019. Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesi. *Jurist-Diction*. 2(5): 1631-1654

Aryanto, Bayu, dkk. 2021. Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional.* 10(2): 187-205

Bahas, Cristofel Tuba Lay. 2020. Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*. 12(2): 84-96

Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden (Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 21(1): 123-140

Dalimunthe, Dermina. 2017. Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Yurisprudentia*. 3(1): 66-82

Dhamayanti, Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 8(1): 509-526

Faqih, Muhammad. 2019. Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Mimbar Yustitia*. 3(2): 165-178

Fitri, Winda dan Sheerleen. 2021. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7(2): 790-807

Hartini, Rahayu. 2009. Analisis Yuridis UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman *Modal. Humanity*. 4(1): 48-60

Irawan, Rudi. 2018. *Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an*. Jurnal Rayah Al-Islam. 2(2): 232-247

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Setyawan. Juni 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. 1(1): 13-22

Mahardika, Ahmad Gelora. 2020. Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Atas Transportasi Online Di Era Disrupsi. *Diversi Jurnal Hukum*. 6(2): 196-219

Nurhayati, Irna, dkk. 2019. Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Negara Hukum*. 10(2): 168-189

Prayogo, R. Tony. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(2): 191-201

Putra, Marsudi Dedi. 2021. Pembentukan Undang-Undang Jalur Cepat. *Maksigama*. 15(2): 89-103

Rohim, Nur. Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa. *Jurnal Cita Hukum*. 1(1): 117-132

Sanjoyo, Seto. 2020. Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*. 4(1): 64-78

Setiadi, Teguh, dkk. Januari-Juni 2020. Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*. 7(1): 74-85

Prosiding

Koenti, Ishviati Joenaini dan Lidia Purwanti. 2022. *Peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Klaten Dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Klaten*. Seminar Nasional Hasil Riset Universitas Janabrada Yogyakarta.

Pratiwi, Dian Kus. 17, 30 November dan 17 Desember 2020. *Peluang dan Tantangan Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Prosiding Webinar Nasional Berseri: "Perkembangan Hukun Tata Negara di Masa Pandemi" Yogyakarta

Setiadi, Wicipto. 17 Desember 2020. *Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*. Materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Universitas Padjajaran.

Skripsi

Astuti, Wiwi Dwi. "Analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka Pengembangan Industri". *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang *Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.*

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.*

Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *"Pembuatan Undang-Undang"*. https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-undang-undang. Diakses 10 November 2022.

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. "Jenis Perizinan". https://dpmptsp.rokanhulukab.go.id/pages/jenis-perizinan. Diakses 24 Oktober 2022

Kementerian Koperasi dan UKM. *"Jenis Izin Usaha Yang Ada di Indonesia"*. https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/. Diakses 24 Oktober 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *"izin"*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin. Diakses 22 Oktober 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *"usaha"*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha. Diakses 22 Oktober 2022.

Shari S. Warisman. "Sejarah Panjang OSS di Indonesia". https://infiniti.id/blog/legal/sejarah-panjang-oss-di-indonesia. Diakses 20 Oktober 2022